

Pengaruh hukum waris adat Bali terhadap norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera

Rinneke Dewi Wahyuningtyas, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20204684&lokasi=lokal>

Abstrak

Pembangunan Nasional yang kita lakukan selama hampir seperempat abad ini adalah untuk seluruh penduduk Indonesia yang hidup di Tanah Air ini. Keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh penduduk karena penduduk merupakan sumber daya manusia bagi kegiatan pembangunan dan juga pemakai hasil pembangunan. Tetapi kadang-kadang kita kurang memperhatikan apa dan bagaimana pengaruh pembangunan tersebut terhadap penduduk. Sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) yang dimulai pada Repelita VI adalah pembangunan kualitas manusia dan masyarakat. Agar pembangunan tersebut dapat berhasil dengan baik kita harus memahami pengaruh timbal balik antara setiap sektor dengan perkembangan kependudukan. Dalam program pembangunan di sektor kependudukan pemerintah terus menerus menggalakkan program Keluarga Berencana (KB) dan pada tahapan sekarang ini memperkenalkan suatu pola yang disebut Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) dengan penekanan pada jumlah anak cukup dua orang dan memberikan nilai sama kepada anak laki-laki dan perempuan. Dari segi prinsipnya, NKKBS ini tampak kurang sejalan dengan norma hukum waris adat Bali dengan sistem kekeluargaannya yang patrilineal. Oleh karena itu timbul kekhawatiran adanya kemungkinan NKKBS itu terhambat pelembagaannya dalam masyarakat di Bali sehingga perlu diteliti sejauh mana pengaruh timbal balik antara keduanya. Berdasarkan penelitian kepustakaan yang dilakukan diharapkan akan diketahui apa dan bagaimana pengaruh hukum waris adat Bali tersebut terhadap NKKBS. Tulisan ini diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman tersebut dan menjadi dasar untuk pengembangan dan pembangunan penduduk serta memberikan gambaran tentang potensi kependudukan kita di masa depan.